

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA BERBASIS MASYARAKAT

Oleh

Moh Solehuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

ABSTRAK : *Lembaga pendidikan Islam memiliki peran ganda selain menyiapkan anak didik menguasai pengetahuan yang berguna bagi kehidupan masa depannya juga memiliki tanggung jawab sebagai wadah pembentukan karakter religius anak dalam mengarungi kehidupan sosial dan akheratnya kelak. Madrasah sebagaimana lembaga pendidikan Islam juga berperan dalam penanaman dan pengembangan nilai masyarakat. Adanya pergeseran nilai dan tuntutan modernisasi menyebabkan lembaga pendidikan terseret pada pragmatisme yang menekankan orientasi kelulusan anak didik semata. Tuntutan pragmatis ini seakan menepiskan tujuan utama menyiapkan anak didik menjadi manusia yang utuh: berilmu, beriman, punya kepekaan sosial dan berkarakter.*

Kata Kunci: Madrasah, masyarakat

PENDAHULUAN

Pada zaman milenial ini, semakin dirasakan dampak dari krisis nilai. Masyarakat terus menerus mengalami pergeseran nilai-nilai kehidupan menjadi pondasi terhadap berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan islam diharapkan mampu menjawab krisis tersebut justru semakin terjebak dalam orientasi pragmatis.

Pendidikan secara umum merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Keluarga menjadi lembaga pertama dan utama bagi pembentukan nilai-nilai dan karakter manusia (*habitualformation*), pemerintah dengan fasilitas sekolah meneruskan nilai-nilai dan karakter yang dibangun di lingkungan keluarga sebagai pendidikan kedua, dan dilanjutkan dengan kehidupan di masyarakat yang juga bertanggung jawab dalam pembentukan moralitas anak. Ketiga lembaga yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara sering disebut *Tricentra*

*Pendidikan.*¹ Namun, aktualisasi pemeransertaan, terutama antara sekolah dengan masyarakat tersebut masih sangat variatif antar daerah dan antar satuan atau unit-unit pendidikan. Diantara faktor penyebab utama adalah paradigma pembangunan dan pengembangan yang diberlakukan, sehingga muncul pluralisme tersebut dan mempengaruhi pola dan prilaku para birokrat .

Pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pendidikan, direncanakan dengan pendekatan *mechanisticplanning model* atau *engineering model* yang memposisikan masyarakat sebagai *obyek* dari sebuah *blueprint* perubahan yang berasal dari atas² Dengan paradigma ini, maka pemeransertaan masyarakat identik dengan memaksa masyarakat untuk mengerti dan mengikuti kemauan birokrat pendidikan dan membantu keberhasilan implementasi kemauan tersebut. Pola pendekatan ini makin diperparah oleh masih melekatnya budaya *feodal* yaitu sikap *paternalistik* dan hubungan *patron klien*. Dengan sikap paternalistik, hubungan antara birokrat dan masyarakat diposisikan sebagai hubungan vertikal dari atas, sedang pola hubungan patron klien.

Paradigma berikutnya menyangkut pemahaman tentang partisipasi itu sendiri, yang sesungguhnya merupakan akibat logis dari paradigma yang pertama. Paradigma demikian memposisikan masyarakat atau institusi kemasyarakatan sebagai subordinasi dari birokrasi pemerintah yang hanya menjadi penerima pasif program dan berpartisipasi sesuai dengan “*kapling*” yang disediakan oleh pemerintah.

Madrasah Sebagai Sekolah Bercirikan Khas Agama

Madrasah dari asal katanya “darosa” berarti tempat untuk belajar.³ Beberapa kalangan menyamakan istilah madrasah dengan sekolah, namun menurut Karel A. Steenbrink istilah madrasah dan sekolah berbeda maknanya, karena keduanya memiliki makna yang berbeda.

Menurut Ismail raji Al-faruqi madrasah merupakan sistem pendidikan yang menggabungkan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem modern (Barat). Dalam hal ini madrasah memiliki dua keuntungan yaitu upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan tiap sistem dan adanya adaptasi metodologi, pembiayaan yang tidak bertumpu dari dana waqof tapi juga pemerintah.⁴

¹ Muhammin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka DasarOprasionalnya*, (Bandung ;Trigenda Raya ,1993) hal.287.

²Loekman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta ; Kanisius,1995) hal. 78

³ Lihat Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jjakarta: Depdikbud, P3B, Balai Pustaka, 1982), hal. 618

⁴ Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka 1984), hal 22-24

Madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Kebijakan Menteri Agama Tarmizi Taher.⁵ Jauh sebelumnya Mukti Ali mencoba menjembatani ketimpangan madrasah dengan sekolah umum dengan menawarkan alternatif pengembangan madrasah melalui SKB 3 Menteri yang berusaha mensejajarkan madrasah dengan sekolah umum dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama.

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama muatan kurikulum madrasah dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an-hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Islam dan Bahasa Arab, sehingga porsi pendidikan agama lebih banyak. Sementara pada pendidikan selain madrasah, mata pelajaran agama Islam digabung menjadi satu dan porsinya dua jam per-minggu.⁶

Ciri khas agama tersebut berupa : *pertama*, mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam. *kedua* suasana keagamaannya yang berupa suasana kehidupan agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhhlak mulia di samping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Sementara madrasah diniyah adalah madrasah yang yang dikhususkan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan tanpa ada muatan pelajaran umum. Mata pelajaran yang diberikan adalah lebih spesifik mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, hadist, Fiqih, SKI, Bahsa Arab dan ilmu-ilmu alat lainnya seperti nahwu, shorof, aqidah-akhhlak. mana jemeyapun juga sangat longgar, tanpa terikat dengan peraturan-peraturan pemerintah. Proses Pengajaran tidak terikat sama sekali dengan aturan sentralistik dari pemerintah.

Di Indonesia terdapat sekian banyak madrasah yang sejak semula tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat serta terbiasa dengan kemandirian. Kemandirian tersebut terbatas pada persoalan dana dan pengelolaananya, terutama Madrasah swasta yang jumlahnya lebih besar dibanding madrasah negeri. Sedangkan dalam hal pengembangan pendidikan dan pengajaran banyak terikat oleh aturan sentralistik untuk memperoleh legalitas formal.⁷

Pola baru pendidikan yang lebih otonom dan demokratis memberikan kesempatan bagi madrasah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan akan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Madrasah akan lebih

⁵ Muhammin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II 2004), hal 177

⁶ Ibid,177

⁷Muaimain, *wacana*, 195

luwes mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme akan lebih diutamakan daripada pendekatan birokratik

PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Madrasah

Latar belakang kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain *pertama*, Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. *Kedua*, sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren di mana lulusannya kelak mendapat kesempatan yang sama dengan sekolah pada umumnya dan mendapat pengakuan dari masyarakat. *Ketiga*, upaya menjembatani sistem pendidikan tradisional –yang selama ini dilakukan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern.⁸

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk meraih kehidupan sejahtera duniawi dan kebahagiaan hidup di akhirat.

Tuntutan masyarakat tersebut telah dijawab oleh madrasah dengan melakukan upaya modernisasi dalam segala hal. Madrasah mulai membenahi diri dengan melakukan perubahan-perubahan di sisi profesionalisme, manajemen, fasilitas maupun struktur kurikulum. Respon terhadap segala perubahan dilakukan sesuai tuntutan zaman, mulai dari muatan pelajaran, profesionalisme pengajar, manajemen modern, sehingga tugas madrasah yang semula hanya mementingkan tujuan ukhrawi semakin didekatkan kehidupan real duniawi. Idealisme inilah yang menjadi tuntutan masyarakat modern saat ini, di samping tugas utamanya menyiapkan anak didik yang beriman.

Sementara tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan menurut anNahlawi adalah sebagai berikut :

1. Merealisasikan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan agar anak didik taat beribadah, mentauhidkan Allh dan tunduk atas perintahNya.
2. Memelihara fitrah anak didik agar tidak menyimpang dari Tujuan penciptaan manusia.
3. Sebagai wadah sosialisasi dalam peradaban Islami dengan cara mengintegrasikan ilmu alam dan sosial dengan landasan ilmu-ilmu agama

⁸ Muhammin, Abdul Madjid, *pemikiran pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan kerangka Operasionalnya)*, (Bandung, Trigenda Karya, 1993),hal 305

sehingga mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh negatif dan subyektif.
5. Memberikan wawasan nilai dan moral sehingga anak didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah perkembangan zaman yang semakin mengalami krisis nilai.⁹

Dari tugas di atas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran ganda yakni berfungsi sebagai pewarisan budaya (*agentofconservative*) berperan sebagai pewaris budaya melalui pendidikan sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan norma-norma serta adat kebiasaan dan berbagai perilaku tradisional yang telah mmebudaya pada satu generasi ke generasi berikutnya. Di lain pihak madrasah juga berperan sebagai *agentofchange* yaitu upaya untuk membuang unsur budaya lama yang dipandang tidak cocok dan perlunya memasukkan unsur budaya baru. Intinya madrasah merupakan tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang telah membudaya.

Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan berbasis masyarakat

Terlepas dari paradigma-paradigma di atas, pendidikan dengan *berbasis* pada masyarakat adalah proses *human actionplanning model* yaitu model yang menekankan pada upaya untuk mensistematisasikan aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunnya menjadi sebuah dokumen perencanaan atau kebijakan. Konsekuensinya adalah keputusan tentang pembangunan pendidikan adalah hasil kesepakatan bersama antara birokrasi dan masyarakat. Proses pembangunan pun seharusnya menerapkan prinsip *people-centereddevelopment*¹⁰

Partisipasi ditafsirkan sebagai kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai dan budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Pendidikan harus berlangsung dari, oleh dan bersama masyarakat.¹¹ Pendidikan dari masyarakat artinya memberikan jawaban terhadap kebutuhan (*needs*) masyarakat, oleh masyarakat berarti masyarakat bukan obyek pendidikan, tetapi berpartisipasi aktif di mana masyarakat mempunyai peranan dalam setiap langkah program pendidikannya, prinsip bersama masyarakat berarti, masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat, karena lahir dari

⁹ Muhammin, *Pemikiran*,hal. 307

¹⁰MoeljartoTjokrowinoto, *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, (Yogyakarta ; Tiara Wacana,1995) hal. 80

¹¹ H.A.R. Tillar, *Pendidikan,Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia,Setrategi ReformasiPendidikan Nasional*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999) hal. 80

kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri. Inilah yang sekarang sering disebut sebagai pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Pengertian tentang berbasis dapat menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa apabila sesuatu berbasis masyarakat, maka hal itu sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan, kurikulum, standar dan ujian, guru dan kualifikasinya persyaratan siswa dan sebagainya.¹²

Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di masyarakat. Watson (1991) sebagaimana dikutip oleh Umberto Sihombing dalam makalahnya yang berjudul “Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat” mengemukakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki tiga (3) elemen yaitu :

1. Mementingkan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan program belajar dan senantiasa memperhatikan kebutuhan belajar masyarakat, karena sebenarnya mereka tahu apa yang mereka butuhkan.
2. Program dimulai dari perspektif yang kritis. Ada tiga perspektif dalam melihat masyarakat yaitu konservatif, liberal dan kritis. Pendidikan berbasis masyarakat menggunakan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada dan partisipasi dalam setiap kegiatan.
3. Pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program itu dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. ¹³

Selanjutnya Brookfield (1987) membandingkan antara pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) dengan pendidikan berbasis sekolah (*school-based education*), antara lain ditunjukkan bahwa kurikulum pendidikan berbasis masyarakat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, masalah yang diangkatnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, urutan pembelajarannya tergantung warga belajar, waktunya belajar fleksibel, menggunakan pendekatan andragogi, biasanya tidak mengutamakan ijazah. Sementara kurikulum pendidikan berbasis sekolah tergantung pada pokok bahasan, urutan pelajarannya sudah

¹²Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Adi Cita, 2001) hal. 176

¹³*Ibid.*,hal 188

diatur, waktu belajarnya tidak fleksibel, menggunakan terminologi paedagogis dan mengutamakan ijazah.¹⁴

Tantangan yang dihadapi oleh Madrasah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan tersebut berasal dari berbagai sektor seperti terurai di bawah ini :

Politik

Kehidupan politik suatu negara berdampak pada cara negara membimbing, mengarahkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Kondisi politik yang stabil dalam sebuah negara akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan terutama dalam sistem pendidikan.¹⁵ Hal ini dapat diamati pada perkembangan perjalanan madrasah hingga saat ini yang tak terlepas dari kebijakan menteri agama di mana madrasah dinaungi dan departemen pendidikan selaku pengambil kebijakan secara nasional.

Budaya

Dalam perkembangan kebudayaan saat ini, satu negara akan mempengaruhi negara lainnya. Perkembangan dan adopsi budaya semakin tipis batasnya sehingga pengaruh budaya bangsa lainnya akan dengan mudah mempengaruhi masyarakat kita. Hal ini menyebabkan proses akulterasi, yaitu faktor nilai yang mendasari kebudayaan sangat menetukan eksistensi kebudayaan tersebut. nilai-nilai kultural bangsa semakin melemah akibat dari pengaruh budaya lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi

Jika perkembangan teknologi yang sangat cepat tanpa dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan, akan berdampak negatif pada kehidupan manusia. Tantangan ini menuntut lembaga pendidikan mampu mendasari teknologi tersebut dengan norma-norma agama sehingga hasilnya berdampak positif bagi manusia.

Perubahan sosial

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial seringkali mengalami ketidakpastian tujuan yang disepakati. Disinilah peran pendidikan sebagai pengarah yang rasional dan konstruktif sehingga mampu memecahkan problem sosial yang ada.

Sistem nilai

Sistem nilai dijadikan sebagai tolak ukur bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat yang befungsi sebagai pengendali, mengatur dan mengarahkan

¹⁴Ibid., hal 187

¹⁵ Muhammin, *Pemikiran...,* hal.316

perkembangan masyarakat. Pergeseran nilai di masyarakat saat ini yang cenderung mengalami penurunan, meninggalkan nilai-nilai tradisi yang ada. Ini menjadi tantangan madrasah yang berfungsi untuk mengawetkan nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh masyarakat.

Sistem Nilai dan perkembangannya di Masyarakat

Saat ini fenomena kehidupan di masyarakat telah mengalami pergeseran nilai-nilai sosial keagamaan. Kehidupan beragama dalam dimensi vertikal dengan-Nya semakin mengalami kekeringan spiritual. Sementara nilai-nilai horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia juga terdapat pergeseran dari sikap kegotongroyongan, tolong menolong, kasih sayang terhadap sesama dan sebagainya kepada sikap individualistik, materialistik, konsumtif dan hedonistik.

Krisis nilai yang menyentuh kehidupan masyarakat menyangkut nilai suatu perbuatan baik dan buruk, bermoral amoral, sosial asosial. Perilaku yang diukur atas etika pribadi dan sosial Sikap-sikap penilaian tersebut mengalami perubahan ke arah sebaliknya yaitu toleransi, permisif bersikap netral terhadap perilaku yang semula dinilai buruk tak sopan dan sebagainya. Krisis moral tersebut pada dasarnya berpangkal dari perubahan pola pikir manusia yang cenderung ke arah rasionalisme dibanding dogmatisme, realisme dan pragmatisme dibanding ritual formalisme ke arah sekularisme daripada ke pola

pikir yang berpegang pada moralisme idealisme agama.¹⁶

Pergeseran tersebut terjadi karena beberapa kemungkinan

1. Modernisasi yang terjadi, terutama dalam pembaharuan pemikiran mengakibatkan rasa beragama hanya berjalan di otak dan badan tetapi kurang berjalan di hati.
2. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang tengah mengalami era industri masyarakatnya sangat mendambakan rasionalitas, efisiensi, individualitas, mekanistik, materialistik, sehingga semua hal yang berbau sacred (suci) nyaris tidak mendapat tempat.
3. Globalisasi gaya hidup sebagaimana diramalkan JohnNaisbitt yang mencakup 3F yaitu Food, fashion dan fun akan mengakibatkan manusia cenderung untuk materialistik, konsumtif, individualistik hedonistik.¹⁷

Kondisi di atas telah menyebabkan terjadinya krisis nilai dan moral yang berdampak pada lunturnya nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Dalam pemahaman terbatas terjadilah krisis akhlak, yang disamping diakibatkan oleh ketiga faktor di atas juga karena tidak efektifnya pendidikan nilai dalam arti luas baik di rumah, sekolah maupun masyarakat.

¹⁶ Muzayyin Arifin, *Kkaita Selektia Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,2003) hal 63 ¹⁷ Muhammin, *wacana*, hal 299

Sementara Konsep nilai ketika dihubungkan dengan logika menjadi benarsalah, dihubungkan dengan estetika menjadi indah jelek dan ketika dihubungkan dengan etika menjadi baik – buruk.. nilai dinyatakan sebagai kualitas, kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan.¹⁷

Ketika nilai dianggap sebagai perilaku tertentu yang terkait dengan konsepsi tertentu tentang tahu dan yang diketahui. Dalam hal ini pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya menjadi keyakinan yang kemudian direfleksikan menjadi sikap dan perilaku sehingga nilai dianggap sebagai perwujudan diri (*selfactualization*). Perwujudan diri di sini merupakan perwujudan potensi-potensi diri menjadi nyata. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan positif, misalnya kemampuan untuk menjadi rasional, bermoral, dan sebagainya.

Cara memperoleh nilai ada dua. *Pertama*, pencarian kebenaran dan keutamaan melalui filsafat yakni melalui cara berpikir kontemplatif (paradigma logis abstrak). Filsafat mengoptimalkan fungsi untuk mengemukakan makna yang tidak terjelaskan oleh ilmu pengetahuan. Makna itu menjadi rujukan (nilai) seseorang jika benar-benar diyakini atau dirumuskan dalam klausul-klausul normatif.

Kedua nilai diperoleh dari berpikir logis empiris. Ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang selalu memerlukan bukti-bukti nyata dalam menguji kebenaran. Nilai dari jalan ini banyak mengungkapkan kebenaran teoritik karena ditempuh melalui cara berpikir ilmiah. Ketiga memperoleh nilai melalui hati dan fungsi rasa, cara ini tidak menyertakan pertimbangan logis atau logis empiris. Dengan cara ini nilai masuk melalui pintu intuisi dan bersarang dalam keyakinan hati. Model perolehan nilai dilakukan dengan penggambaran batin pada wilayah supra logis. Kebenarannya hanya dapat diterima melalui rasa.¹⁸

Internalisasi nilai di madrasah

Dalam teori psikoanalisa penanaman nilai melalui ajaran-ajaran langsung tentang tingkah laku moral, teori behavioristik melalui hubungan stimulus respon, yakni memberikan ganjaran bagi pembentukan tingkah laku dan memberikan hukuman untuk menghilangkannya.

Pendidikan nilai mencakup wilayah budi pekerti, nilai, norma dan moral. Budi pekerti bersumber dari nurani yang bersumber dari moral. Moral bersumber dari kesadaran hidup yang berpusat pada akal pikiran yang merupakan pedoman dalam berbuat dan bertingkah laku. Nilai adalah suatu pengertian atau penafsiran yang digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda.

¹⁷ Louis A Kattsof, *ElementsofPhilosophy*, alih bahasa Soejono Margono (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989) hal 335

¹⁸ Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: Refika aditama, 2007), 7374

Pelaksanaan pendidikan berbasis nilai di madrasah dapat menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan penanaman nilai (*inculcationapproach*)
Pendekatan ini lebih efektif menggunakan role model, di mana seluruh komponen madrasah menjadi model bagi aplikasi nilai keagamaan dan sosial. Secara langsung anak didik akan melihat role model ini sebagai cermin mereka dan mengadopsinya dalam perilaku keseharian mereka.
2. Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral developmentapproach*)
Cara ini dapat dilakukan misalnya dengan mengangkat dan mendiskusikan kasus atau persoalan nilai dalam masyarakat yang mengandung dilema. Anak didik diberi kebebasan penuh hingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tingkat perkembangan moral reasoning masing-masing.
3. Pendekatan analisis nilai (*valueanalysisapproach*)
Pengetahuan dan pemahaman konsep penting dalam penanaman moral, membentuk sikap moral yang lebih stabil dalam diri seseorang.
4. Pendekatan klasifikasi nilai (*valueclassificationapproach*)
Dengan memperhatikan faktor keadaan dan bahan pelajaran yang relevan. Namun penggunannya harus hati-hati agar tidak membuka kesempatan anak didik untuk memilih nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang ada terutama nilai agama.
5. Pendekatan pembelajaran berbuat (*actionlearningapproach*)¹⁹ Pendekatan ini memberi kesempatan bagi anak didik untuk melakukan proses pembelajaran di ruang kelas. Lingkungan sosial dapat menjadi obyek pembelajaran. Observasi terhadap segala hal yang terjadi di luar kelas menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut kemudian diambil hikmah pembelajarannya.

Kilas balik : Madrasah sebagai pelanggeng nilai

Posisi lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah saat ini berada dalam arena konflik nilai-nilai yang membawa pada transisi nilai kehidupan. nilai spiritual maupun moral-etik yang sensitif terhadap sentuhan-sentuhan nilai hedonistik (kenikmatan hidup) materiil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Madrasah dalam posisi ini harus bersikap dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu membudayakan peserta didik dengan nilai-nilai ideal sehingga mampu menjadi pondasi moral dan spiritual masyarakat dalam menghadapi tantangan

¹⁹M.Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Jjakarta : Pedoman Ilmu Jaya*) hal.

modernisasi madrasah harus berperan aktif dan interaktif antara pengaruh realistik dan pragmatis dari luar.

Dalam proses interaksi antara nilai-nilai lama dan barupun madrasah harus mampu membacanya sebagai peluang untuk mewujudkan model pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman.faktor yang menentukan survive atau tengelamnya nilai ideal masyarakat adalah tergantung dari daya rentangan nilainilai itu sendiruntuk itulah nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh sistem madrasah harus berfungsi secara aktual sebagai filter, selektor, dan pengontrol terhadap akibat negatif nilai-nilai yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruqi , Ismail Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, terj Anas Mahyudin Bandung : Pustaka 1984

Arifin, Muzayyin, *kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,2003

Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adi Cita, 2001

Hasan, M.ali, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya*

Kattsof, Louis A, *ElementsofPhilosophy*, alih bahasa Soejono Margono, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989

Latif, Abdul, *Pendidikan Berbasis Nilai kemasyarakatan*, (bandung: Refika aditama, 2007

Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, Bandung ;Trigenda Raya ,1993

Muhaimin, *wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II 2004

Sutrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta ; Kanisius,1995

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta ; Tiara Wacana,1995